

**DIPLOMASI DIGITAL AZERBAIJAN DALAM MEMBENTUK OPINI
PUBLIK TERHADAP KONFLIK NAGORNO-KARABAKH TAHUN 2020**

SKRIPSI



Oleh:

SAID HUSIN ZIDAN FIRJATULLAH FACHIR

19323158

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPLOMASI DIGITAL AZERBAIJAN DALAM
MEMBENTUK OPINI PUBLIK TERHADAP KONFLIK
NAGORNO-KARABAKH TAHUN 2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

20 Juni 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

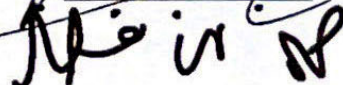
Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 3 Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D

Tanda Tangan


PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Nama : Said Husin Zidan Firjatullah Fachir
No. Mahasiswa : 19323158
Dosen Pembimbing : Rizki Dian Nursita, S.I.P, M.H.I.
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Diplomasi Digital Azerbaijan dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Konflik Nagorno-Karabakh Tahun 2020.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya independent saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertai, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan paraphrase diindikasikan dengan jelas. Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarism. Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 20 Juni 2023



Said Husin Zidan Firjatullah Fachir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan Penelitian	4
1.5 Tinjauan Pustaka	5
1.6 Kerangka Pemikiran.....	8
1.7 Argumen Sementara.....	10
1.8 Metode Penelitian.....	11
1.9 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2: OPINI PUBLIK TERHADAP KONFLIK NAGORNO-KARABAKH	
2.1 Peran OSCE dalam Sengketa antara Azerbaijan dan Armenia dalam Memperebutkan Nagorno Karabakh	14
2.2 Peran Pemerintah Azerbaijan dalam Diplomasi Publik	18
BAB 3: DIPLOMASI DIGITAL AZERBAIJAN DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK TERHADAP KONFLIK NAGORNO-KARABAKH	22
3.1 Agenda Setting	22
3.2 Presence Expansion	33
3.3 Conversation-Generating.....	37
BAB 4: PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Rekomendasi	47
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tweet Berdasarkan Dari Sentimen Publik	20
Tabel 2.2 Diagram Total Tweet Yang Diolah Selama Konflik	21
Tabel 3.1 Data Topik Berita Di Twitter Dari September 2020.....	31
Tabel 3.2 Data Topik Berita Di Twitter Dari September 2020 Berdasarkan Tweet..	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tweet Dukungan oleh Armenia #RecognizeArtsakh	22
Gambar 2.2 Tweet Dukungan oleh Azerbaijan #StopArmenianAgression	23
Gambar 3.1 Tweet Tahir Mirkishili selaku Ketua Komite Kebijakan Ekonomi Azerbaijan.....	26
Gambar 3.2 Sahiba Gafarova selaku Ketua Majelis Nasional Azerbaijan	27
Gambar 3.3 Tweet dari Rashad Nabiye b selaku Menteri Pengembangan Digital dan Transportasi Republik Azerbaijan	28
Gambar 3.4 Tweet dari Presiden Azerbaijan	30
Gambar 3.5 Tweet dari Pusat Jerman Kaukasus Selatan.....	30
Gambar 3.6 Tweet dari Hikmet Hajiye v selaku Kepala Departemen Kebijakan Luar Negeri Administrasi Kepresidenan Azerbaijan	34
Gambar 3.7 Reaksi Publik yang se pakat terhadap Tweet Hikmet Hajiye v selaku Kepala Departemen Kebijakan Luar Negeri Administrasi Kepresidenan Azerbaijan	35
Gambar 3.8 Reaksi Publik yang tidak se pakat terhadap Tweet Hikmet Hajiye v selaku Kepala Departemen Kebijakan Luar Negeri Administrasi Kepresidenan Azerbaijan	36
Gambar 3.9 Tweet Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 15 Oktober 2020	37
Gambar 3.10 Tweet Government of Pakistan mengenai Pertemuan Presiden Pakistan Dr. Arif Alvi dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliye v	38
Gambar 3.11 Tweet Imran Khan selaku Perdana Menteri Republik Islam Pakistan	39
Gambar 3.12 Respon negative dari pengguna Twitter terhadap Tweet yang diposting oleh Hikmet Hajiye v	42
Gambar 3.13 Respon Negative dari pengguna Twitter terhadap Tweet yang diposting oleh Ilham Aliye v	43
Gambar 3.14 Respon Negative dari Pengguna Twitter terhadap Tweet yang diposting oleh Ilham Aliye v	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan Media Sosial dalam diplomasi saat ini sangatlah besar karena seperti yang kita ketahui masyarakat saat ini sangatlah memiliki ketergantungan yang tinggi dengan media sosial hal inilah yang membuat diplomasi dalam media sosial dapat dikatakan efektif karena pengguna mediasosial sangatlah tinggi. Twitter sebagai salah satu media sosial yang paling populer saat ini oleh karena itu dalam dunia diplomasi peranan twitter dapat dikatakan sangat besar pengaruhnya seperti dapat dilihat dalam konflik yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menulis beberapa tweet mengenai hubungan yang memanas antara kedua belah negara ini.

Interaksi di antara anggota masyarakat internasional dalam berbagai bentuk merupakan fokus dari bidang Hubungan Internasional. Studi Hubungan Internasional mencakup berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, budaya, dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan dinamis Hubungan Internasional, aktor yang terlibat tidak hanya terbatas pada negara-negara, tetapi juga melibatkan aktor nonnegara seperti masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sosial dan informasi ini, manusia memanfaatkan alat komunikasi yang dikenal sebagai media. Di era saat ini, media sosial, sebagai salah satu bentuk media baru, memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan manusia. Dampak media sosial sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan

politik, baik dalam skala lokal maupun internasional. Kemajuan teknologi digital dan media telah meningkatkan partisipasi individu dalam politik, dan peran individu dan masyarakat sipil semakin mempengaruhi politik global. Melalui media digital, individu dan kelompok dapat dengan mudah berkomunikasi dan berorganisasi, sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Saat ini, masyarakat umum juga dapat mengekspresikan pendapat mereka terkait peristiwa politik dan isu-isu internasional. Melalui cara ini, komunikasi digital dan teknologi informasi telah mengubah dinamika kekuasaan di antara aktor-aktor politik global. Teknologi informasi juga memperkuat peran aktor-aktor baru yang memiliki pengaruh dalam politik dan merubah struktur hubungan dan peran antara aktor-aktor klasik dalam politik internasional. (Aronson, 2005: 540-541).

Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada tiga platform media sosial utama yang sering digunakan oleh masyarakat global, yaitu Twitter, Instagram, dan Facebook. Ketiga platform ini memiliki popularitas tinggi dalam berbagi konten politik dan topik lainnya. Penggunaan media sosial terus meningkat, termasuk dalam konteks isu-isu politik global. Di era saat ini, peran media sosial sangat signifikan dalam menghadapi masalah global dan internasional, termasuk dalam mengatasi konflik antara negara-negara.

Sebagai ilustrasi, beberapa situasi konflik internasional di negara-negara di wilayah Arab, seperti peristiwa Arab Spring, konflik Israel-Palestina, dan ketegangan Iran-AS, telah menunjukkan pemanfaatan media sosial sebagai alat yang memiliki peranan penting. Selain konflik-konflik yang telah disebutkan, terdapat juga kasus Konflik Nagorno-Karabakh yang terjadi pada tahun 2020. Dalam konflik tersebut,

media sosial dimanfaatkan sebagai sarana propagandis oleh kedua negara yang terlibat dalam pertikaian tersebut.

Sejak tahun 1988, wilayah Nagorno-Karabakh telah menjadi sumber konflik yang diperebutkan oleh Armenia dan Azerbaijan. Konflik ini berakar dari perselisihan antara etnis Armenia dan etnis Azerbaijan yang tinggal di wilayah tersebut. Nagorno-Karabakh terletak di bagian barat Azerbaijan dan pada masa Soviet, wilayah ini menjadi Daerah Otonomi Nagorno-Karabakh dengan luas sekitar 4.400 km². Wilayah Nagorno-Karabakh meliputi distrik Askeran, bekas distrik Aghdara, distrik Khojavend, distrik Shusha, dan kota Khankendi. Dari segi geografis, Nagorno-Karabakh mencakup sekitar 5,1% dari total wilayah Republik Azerbaijan. (Qurbanov, 2008).

Konflik Nagorno-Karabakh pertama antara Armenia dan Azerbaijan terjadi dari tahun 1992 hingga 1994 dan kemudian mengalami periode ketidakaktifan hingga tahun 2020. Pada bulan September tahun 2020, terjadi eskalasi konflik Nagorno-Karabakh yang kedua. Selama perang berlangsung, media sosial telah menjadi alat yang digunakan untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, dan juga digunakan sebagai alat propaganda oleh politisi dan masyarakat dari kedua negara yang terlibat dalam konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana media sosial menjadi alat propaganda dalam konflik Nagorno-Karabakh, serta bagaimana aktor-aktor negara atau non-negara terlibat dalam konflik tersebut melalui media sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya tulis diatas makarumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

BAGAIMANA DIPLOMASI DIGITAL AZERBAIJAN DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK MENGENAI SENGKETA NARGONO – KARABAKH?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran OSCE dalam menangani sengketa Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia.
2. Untuk mengetahui peran diplomasi digital Azerbaijan dalam membentuk opini public mengenai sengketa Nargono-Karabakh.

1.4 Cakupan Penelitian

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya mengenai pembahasan penelitian yang sudah saya lakukan ini alangkah baiknya apabila saya memberitahukan adanya batasan-batasannya terkait penelitian ini dengan jelas, yang dimana penelitian ini berfokus terhadap peranan Diplomasi Twitter terhadap konflik yang terjadi Antara Azerbaijan dan Armenia yang terjadi pada tahun 2020 karena dengan adanya kemajuan teknologi diplomasi ini menjadi sebuah media baru dalam berdiplomasi karena seperti yang kita ketahui dengan adanya media baru seperti ini memiliki peluang bagi masyarakat luas akan sadarnya pentingnya diplomasi antar negara dan menjadikan diplomasi antar negara menjadi lebih transparan. Dalam penulisan penelitian ini membatasi tahunnya

pada judul penelitian yang dimana hal ini bertujuan agar memfokuskan terhadap konflik yang terjadi pada kurun waktu tersebut dikarenakan diplomasi pada media twitter tersebut dimulai pada tahun yang tertera pada kurun waktu tersebut dan cakupan penelitian ini berfokus pada diplomasi twitter dalam penanganan yang terjadi pada konflik yang telah ditulis dan pada kurun waktu yang tertera.

1.5 Tinjauan Pustaka

Diplomasi publik Azerbaijan dalam membentuk opini public terhadap konflik Nagorno-Karabakh merupakan pembahasan yang menarik untuk diteliti sehingga sudah banyak literatur-literatur yang membahas isu tersebut. Berikut beberapa literatur serta perbandingannya dengan skripsi ini.

Chanda Allana Leckie dalam jurnalnya *The Nagorno-Karabakh Conflict: Obstacles and Opportunities for a Settlement* menjelaskan bahwa upaya OSCE Minsk group menemukan yang adil dan solusi obyektif untuk konflik, tetapi juga hambatan (Leckie, 2005). Solusi yang paling masuk dan realistis untuk perselisihan ditemukan dalam rencana perdamaian negara bersama yang ditawarkan oleh *OSCE Minsk Group* (Leckie, 2005). Tulisan Leckie sangat informatif, akan tetapi dampak yang dikaji masih sangat umum sehingga belum ada dampak diplomasi digital dalam tulisannya. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba menganalisa lebih spesifik bagaimana dampak diplomasi digital terhadap konflik Nagorno-Karabakh (Leckie, 2005).

Ensi Adistya Kristiani dalam jurnalnya “ Keterlibatan Rusia dalam Upaya Resolusi Konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan 2008-2012 menyatakan bahwa konflik ini tidak luput dari perhatian Rusia yang memang memiliki

kedekatan secara geografis dan memiliki perhatian terhadap situasi yang terjadi di wilayah sekitar Kawasan Kaukasus (Kristiani, 2012). Melalui posisinya sebagai *co-chair* dalam OSCE Minsk Group bersama dengan Prancis dan Amerika Serikat, Rusia terlibat dalam upaya resolusi konflik Nagorno-Karabakh (Kristiani, 2012). Dengan menggunakan kerangka pemikiran peran pihak ketiga dan mediasi, penelitian ini berusaha menggambarkan dan mengevaluasi keterlibatan Rusia dalam upaya resolusi konflik Nagorno-Karabakh. Dapat disimpulkan bahwa Rusia terlibat secara positif dengan memfasilitasi komunikasi dan negosiasi, namun di sisi lain juga menjadi pihak yang berpotensi memicu ketegangan hubungan antara Armenia dan Azerbaijan. Jurnal yang ditulis Kristiani sangat bermanfaat dan informatif, akan tetapi tulisan ini menjelaskan diplomasi yang digunakan Rusia terhadap Azerbaijan dan Armenia terhadap konflik Nagorno-Karabakh. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba menganalisa bagaimana diplomasi digital Azerbaijan dalam membentuk opini publik mengenai sengketa Nagorno-Karabakh.

Anna Yulia Hartati dalam jurnalnya “Konflik Azerbaijan dengan Armenia Atas Wilayah Nagorno-Karabakh dalam Konteks Hukum Internasional” menjelaskan tentang konflik Azerbaijan dengan Armenia dalam konteks Hukum Internasional. Konflik diantara kedua negara tidak lepas dari faktor sejarah. Analisisnya menunjukkan bahwa perspektif masyarakat Azerbaijan dan Armenia terhadap masalah tersebut sangat bertolak belakang, maka sulitnya mencari solusi atas persoalan tersebut dipahami dengan lebih baik (Hartati, 2020). Penelitian ini sangat baik dan informatif, akan tetapi pada tulisan ini tidak ada menjelaskan diplomasi digital yang dibangun oleh Azerbaijan. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba menganalisa bagaimana

diplomasi digital Azerbaijan dalam membentuk opini public mengenai sengketa Nagorno-Karabakh.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat melihat terdapat beberapa literatur yang sudah membahas diplomasi publik terhadap konflik Nagorno-Karabakh. Akan tetapi belum ada yang berfokus pada diplomasi digital Azerbaijan dalam membentuk opini publik mengenai sengketa Nagorno-Karabakh. Di dalamnya membahas bagaimana Azerbaijan membentuk opini publik mengenai sengketa Nagorno-Karabakh.

1.6 Kerangka Pemikiran

Digital Diplomacy

Telah banyak ahli yang memberikan istilah untuk merumuskan konsep pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam melakukan diplomasi, diantaranya adalah Diplomasi Publik 2.0 (Hallams, 2010); Virtual Diplomacy atau Net Policy (Wehrenfennig, 2012); Diplomasi Digital (Bjola&Holmes, 2015); Twitter Diplomacy (Sobel, Riffe& Hester, 2016); Twiplomacy (Sandre, 2012). Beberapa negara juga memiliki istilah atau sebutan yang berbeda terhadap jenis diplomasi ini. Amerika Serikat (AS) menyebutnya sebagai 21st Century Statecraft, UK dan Indonesia menyebutnya sebagai Digital Diplomacy, sementara Kanada menyebut ini sebagai Open Policy. Untuk mempermudah pembaca dan memfokuskan pembahasan, skripsi ini akan menggunakan istilah Diplomasi Digital (Bjola&Holmes, 2015).

Foreign Commonwealth Office (FCO) UK mendefinisikan diplomasi digital sebagai diplomasi konvensional melalui medium yang berbeda. Melalui internet UK dapat mendengar, menyebarkan, melibatkan dan mengevaluasi dengan cara baru yang jauh

lebih menarik dan terjangkau. Holmes mendefinisikan diplomasi digital sebagai salah satu strategi dalam mengatur perubahan politik internasional melalui perangkat digital dan kolaborasi secara virtual (Bjola&Holmes, 2015).

Diplomasi digital tidak bisa menggantikan diplomasi konvensional, tetapi jika dilakukan dengan keterampilan, diplomasi digital dapat digunakan untuk memperkuat diplomasi konvensional dengan cara yang jauh lebih terjangkau. Menurut Corneliu Bjola, untuk mencapai efektivitas penggunaan internet dan media sosial dalam melakukan diplomasi terdapat tiga dimensi utama, yaitu: *Digital Agenda-Setting*, *Digital Presence-Expansion*, dan *Digital Conversation-Generating* (Bjola&Holmes, 2015).

Dimensi pertama berkaitan dengan *Agenda Setting* dan sejauh mana platform media sosial memungkinkan para diplomat mengatur agenda diskusi dengan target audiens mereka. Penyebaran informasi selalu menjadi tugas utama dalam diplomasi public. Untuk diplomasi baru, menginformasikan adalah prasyarat untuk berinteraksi karena dialog nyata harus didasarkan pada topik keakraban, pemahaman bersama dan kepentingan bersama. Bjola & Holmes mendefinisikan *Agenda Setting* sebagai kemampuan dari media baru untuk mempengaruhi pentingnya topik dalam agenda publik (Bjola & Holmes, 2015). Diplomasi public membantu citra negara tertentu untuk audiens asing mengarahkan perhatian yang terakhir ke topik tertentu sambil mengesampingkan berita yang lebih baik, Diplomat dengan demikian dapat membangun isu dengan menonjol dan layak untuk mendapatkan perhatian audiens dengan memberikan informasi yang relevan tentang isu itu. Dibandingkan dengan media massa tradisional, media sosial menawarkan keuntungan besar dalam “meraih

berita utama” karena jangkauan, frekuensi, kegunaan, kesegeraan, dan bersifat abadi atau permanen (Bjola & Holmes, 2015). Dalam waktu yang bersamaan, kemudahan dan kecepatan dari penyebaran informasi dapat mengarah pada situasi di mana khalayak berada akan terus dibanjiri arus data yang massif, yang pada gilirannya dapat merusak efektivitas upaya digital diplomasi public (Bjola & Holmes, 2015).

Dimensi kedua dari dampak media sosial adalah *Presence Expansion*. Jika pemerintah bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan khalayak asing, pertama-tama perlu untuk menjadi ”di luar sana” di ruang publik yang relevan. Diplomasi ini tidak secara langsung mengarah pada pembentukan citra yang baik atau pendapat yang menguntungkan, tetapi tanpa paparan yang memadai, strategi diplomasi publik pada akhirnya akan mengalami kegagalan. Secara tradisional, "kehadiran" menjadi aspek utama dalam komunikasi massa, pertukaran budaya, atau program pendidikan. Namun, dengan munculnya media sosial, kehadiran diplomasi menjadi lebih meluas melintasi batasan ruang dan waktu. Sebagai contoh, Tim Digital Outreach Departemen Negara Amerika Serikat terlibat langsung dengan Timur Tengah melalui pesan yang diposting di forum internet dalam bahasa Arab, Urdu, dan Persia yang membahas kebijakan AS yang populer (Bjola & Holmes, 2015). Di era digital, ekspansi kehadiran menjadi kondisi yang sangat penting bagi para diplomat agar suara mereka dapat didengar. Seperti yang ditunjukkan oleh Wichowski, kredibilitas dan otoritas diplomat akan terpengaruh jika mereka tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Bukan hanya pesan mereka yang tidak akan terdengar, tetapi mereka juga akan ketinggalan dalam persaingan kampanye informasi (Bjola & Holmes, 2015).

Dimensi ketiga dan terakhir adalah *conversation generating* . Salah satu aspek yang sangat dihargai dalam diplomasi publik yang baru adalah keterlibatannya dengan audiens (Bjola & Holmes, 2015).Diplomasi yang efektif tidak lagi bergantung pada komunikasi satu arah tetapi harus berdasarkan dialog. Ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dua arah atau multipihak antara semua pihak yang terlibat dan mendorong kolaborasi yang bermanfaat (Bjola & Holmes, 2015). Media sosial dengan fitur interaktifnya memiliki banyak keunggulan yang dapat ditawarkan. Dalam konteks diplomatik, hal ini dianggap dapat menciptakan dialog yang berkelanjutan antara diplomat dan publik asing. Komunikasi dua arah memungkinkan diplomat untuk menyesuaikan agenda mereka, mengurangi penyebaran informasi yang salah, dan meningkatkan pemahaman bersama. Ini merupakan keunikan yang memungkinkan media sosial mencapai tujuan diplomasi publik dengan cara yang berbeda dari metode tradisional. Meskipun media sosial menawarkan kemudahan tersebut, penggunaannya sebagai alat diplomasi publik tidaklah mudah. Bahkan, hal ini mungkin membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dan investasi keuangan dibandingkan dengan alat berbasis media tradisional. Tujuan, metode, dan operasi media sosial memerlukan infrastruktur digital yang kompleks dan staf yang terlatih untuk menjalankannya (Bjola & Holmes, 2015).

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara penulis dalam menganalisa bagaimana diplomasi digital Azerbaijan daam membentuk opini publik mengenai sengketa Nagrono-Karabakh melalui tiga dimensi diplomasi publik . Dimensi pertama yaitu *Agenda Setting*,

menunjukkan bagaimana pemerintah Azerbaijan menjadikan isu global dan internasional salah satunya konflik antar negara sebagai agenda publik yaitu dengan mempost konten yang berkaitan dengan mendukung Republik Nagorno-Karabakh separatist dalam konflik pada Twitter @HikmetHajiyev dengan frekuensi 44 hari. Dimensi kedua, yaitu *Presence Expansion*, menunjukkan seberapa hadir akun twitter @HikmetHajiyev diantara global publik . Akun ini mempunyai 307 ribu pengikut dan pada postingannya ia sering menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa yang berasal dari negaranya sendiri yaitu Bahasa Azerbaijan. Dimensi ketiga yaitu *Conversating-generation* yang menunjukkan bahwa akun @HikmetHajiyev sering memberikan diskusi terbuka dan aktif memberikan informasi kepada khalayak ramai pengguna twitter.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009).

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci

dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Iskandar, 2009).

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴ Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif (Robert, 1982).

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 BAB, yakni

1. BAB 1 merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, argument sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan
2. BAB 2 menjelaskan tentang konteks konflik Azerbaijan Armenia terhadap Nagorno – Karabakh, serta perkembangan diplomasi publik Azerbaijan.
3. Bab 3 merupakan BAB yang berisi analisis atau jawaban dari rumusan masalah, yaitu diplomasi digital Azerbaijan melalui *agenda setting*, *presence expansion* dan

conversation-generating.

4. Bab 4 berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB 2

OPINI PUBLIK TERHADAP KONFLIK NAGORNO-KARABAKH

2.1 Peran OSCE dalam Sengketa antara Azerbaijan dan Armenia dalam Memperebutkan Nagorno Karabakh

Di wilayah selatan Kaukasus terdapat dua kawasan kecil yang dikenal sebagai Nagorno dan Karabakh. Kawasan-kawasan ini memiliki posisi strategis yang menghubungkan Timur Tengah, Asia, dan Eropa Timur. Secara resmi, wilayah Nagorno-Karabakh berada di bawah yurisdiksi Azerbaijan, tetapi mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia. Pada masa tersebut, wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan Uni Soviet, yang berhasil menjaga ketegangan antara kedua belah pihak. Namun, saat Gorbachev memimpin dan menerapkan kebijakan glasnost dan perestroika yang memberikan kebebasan bagi wilayah-wilayah Uni Soviet untuk menentukan masa depan mereka sendiri, ketegangan kembali muncul. Armenia mengklaim wilayah tersebut masih menjadi bagian dari wilayah mereka, sementara Azerbaijan menentang klaim tersebut. Setelah keruntuhan Uni Soviet pada akhir tahun 1991, baik Azerbaijan maupun Armenia meraih kemerdekaan, dan tanggung jawab Moskow dalam mengelola dan menangani konflik Nagorno-Karabakh tiba-tiba berakhir. Dalam beberapa bulan berikutnya, konflik tersebut berkembang menjadi perang penuh skala yang melibatkan pasukan Armenia dan bekas pasukan militer Soviet yang berada di wilayah Karabakh Armenia. Akibatnya, wilayah yang

sebelumnya dihuni oleh suku Azeri menjadi terlantar. Lebih dari 20% wilayah Azerbaijan masih diduduki, dan sejak dimulainya konflik pada tahun 1988, lebih dari satu juta orang Azeri terpaksa mengungsi dari rumah mereka di Armenia, Karabakh, dan daerah sekitarnya (Cornel,1999).

Sejak awal tahun 1992, konflik Nagorno-Karabakh juga melibatkan dimensi antarnegara, dengan Armenia dan Azerbaijan sebagai dua negara berdaulat yang terlibat dalam perang tersebut. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam konflik ini, yaitu pemerintah dari kedua negara berdaulat serta pemerintah yang tidak diakui yaitu "Republik Nagorno-Karabakh", yang merupakan faktor penting dalam mencari solusi konflik tersebut. Konflik ini telah menjadi salah satu sengketa yang paling rumit di dunia. Karena merupakan satu-satunya konflik etnis-politik di wilayah Kaukasus yang melibatkan dua negara yang diakui secara internasional, konflik ini juga memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. (Cornel,1999).

Pada awal tahun 1988, terjadi konflik berkelanjutan antara negara-negara Azerbaijan dan Armenia di wilayah yang disengketakan, yaitu Nagorno-Karabakh di Kaukasus Selatan. Konflik ini menyebabkan lebih dari dua puluh ribu korban jiwa dan hampir satu setengah juta orang mengungsi, yang merupakan aliran pengungsi yang signifikan. Krisis ini terutama dirasakan di Azerbaijan, di mana jumlah pengungsi mencapai sekitar satu juta orang.(Cornell,1999).

Konflik Nagorno-Karabakh pertama antara Armenia dan Azerbaijan terjadi dari tahun 1992 hingga 1994 dan kemudian mengalami periode ketidakaktifan hingga tahun 2020. Konflik Nagorno-Karabakh kedua kembali terjadi pada bulan September 2020. Selama perang berlangsung, media sosial menjadi alat yang digunakan untuk

menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, dan juga dimanfaatkan sebagai alat propaganda oleh politisi atau masyarakat dari kedua negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengungkap bagaimana media sosial menjadi sarana propaganda dalam konflik Nagorno-Karabakh dan bagaimana aktor-aktor dari pihak negara maupun non-negara terlibat dalam konflik tersebut melalui media sosial. (Leyla, 2021).

OSCE terlibat dalam upaya penanganan konflik Nagorno-Karabakh melalui mediasi oleh beberapa negara. Pada periode 1991-1992, mediasi dimulai oleh Rusia, Kazakhstan, dan Iran. Rencana awal untuk meresolusi konflik melibatkan gencatan senjata dan pembentukan pemerintahan konstitusional di Nagorno-Karabakh. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena Armenia dan Azerbaijan tetap mempertahankan posisi mereka melalui pertempuran. Pada saat itu, campur tangan PBB terbatas karena Uni Soviet belum secara resmi dibubarkan, dan PBB juga menghadapi kendala sumber daya manusia dan pendanaan akibat fokus penanganan konflik di Afrika. Oleh karena itu, OSCE diberi mandat dan legitimasi sebagai mediator utama dalam konflik ini berdasarkan Bab 7 Piagam PBB. (Jafarova, 2011: hal. 119).

Kelompok OSCE Minsk memiliki peran penting sebagai mediator utama dalam menangani konflik Nagorno-Karabakh sejak awal. Kelompok ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut, dan terdiri dari 12 negara anggota yang meliputi Armenia, Azerbaijan, Belarus, Ceko, Perancis, Jerman, Italia, Rusia, Swedia, Turki, dan Amerika Serikat. Rusia, Amerika Serikat, dan Perancis bertindak sebagai ketiga co-chairman dalam kelompok ini (Nikkar-Esfahani, 2009: hal. 179). Tugas utama kelompok ini adalah menyediakan

kerangka kerja yang memadai untuk mencapai resolusi konflik melalui proses negosiasi yang didukung oleh mereka. Selain itu, kelompok ini juga berupaya mencapai kesepakatan antara negara-negara yang telah menandatangani perjanjian terkait penghentian konflik bersenjata, sehingga dapat memfasilitasi konferensi Minsk, serta mempromosikan proses perdamaian melalui penugasan pasukan perdamaian multinasional yang berasal dari OSCE. (Leckie, 2005)

Sejak berdirinya OSCE Minsk Group, telah diajukan setidaknya empat proposal solusi untuk konflik Nagorno-Karabakh. Proposal-proposal tersebut meliputi paket rencana, rencana bertahap, rencana negara bersama, dan rencana pertukaran wilayah. Mulai dari tahun 1993 hingga Desember 1994, Rusia memainkan peran penting dalam upaya menciptakan perdamaian di wilayah tersebut. Sejak tahun 1994, telah dilakukan beberapa upaya mediasi dalam penanganan konflik Nagorno-Karabakh. (Leckie, 2005).

Konflik Karabakh yang kedua kembali terjadi pada bulan September tahun 2020. Selama berlangsungnya pertempuran, media sosial digunakan sebagai sarana yang menyebarkan kesadaran, kebenaran mengenai konflik, serta menjadi alat propaganda yang dimanfaatkan oleh aktor politik atau masyarakat dari kedua negara yang terlibat dalam konflik tersebut. (Leyla, 2021).

Selama periode 44 hari dari bulan September hingga November 2020, pertempuran dalam konflik Nagorno-Karabakh terus berkecamuk di kedua negara, baik di medan perang maupun di platform media sosial. Kedua negara mulai memanfaatkan media sosial untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Sementara itu, di dunia maya, tidak hanya para pemimpin politik, tetapi juga tokoh publik dan

warga sipil terlibat dalam perang informasi dan opini. Azerbaijan menugaskan Hikmet Hajiyeu, Sekretaris Presiden Republik Azerbaijan sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Luar Negeri Administrasi Kepresidenan, sebagai diplomat digital. Selama konflik, Hikmet Hajiyeu mengajak pengguna media sosial dari Azerbaijan untuk aktif menggunakan tagar di kolom komentar di media konvensional, akun media sosial, atau bahkan akun selebriti internasional yang mendukung Armenia, serta aktor negara maupun non-negara yang mendukung Armenia. (Leyla,2021).

2.2 Peran Pemerintah Azerbaijan dalam Diplomasi Publik

Masyarakat Nagorno-Karabakh di tengah ketegangan yang meningkat, berpendapat bahwa mereka sangat ketakutan dengan keadaan yang tak kunjung menemukan solusi . Tetapi, pihak masyarakat lebih untuk pertempuran berkelanjutan daripada konflik meningkat dengan cepat menjadi pertempuran terburuknya sejak 1990-an. Namun beberapa penduduk mempercayai bahwa perang yang meletus antara Armenia dan Azerbaijan selama 2020 adalah konflik yang paling mematikan sejak lebih dari 25 tahun terakhir. Masyarakat memandang Nagorno-Karabakh sebagai bagian yang hilang dari wilayah mereka sendiri . Itu adalah poin keyakinan dan narasi nasional yang mereka pegang. Masyarakat percaya konflik ini dapat diselesaikan secara damai meskipun banyak korban yang dikorbankan (Arinawati,2021).

Partisipasi masyarakat Azerbaijan dalam menyampaikan pendapat dan merespons perang yang sedang berlangsung merupakan upaya yang terus meningkatkan kesadaran akan konflik tersebut, terutama dengan dukungan dari diaspora warga Azerbaijan yang tersebar di seluruh dunia. Hal ini telah memicu masyarakat untuk terlibat dalam pertempuran informasi dan opini. Selama perang,

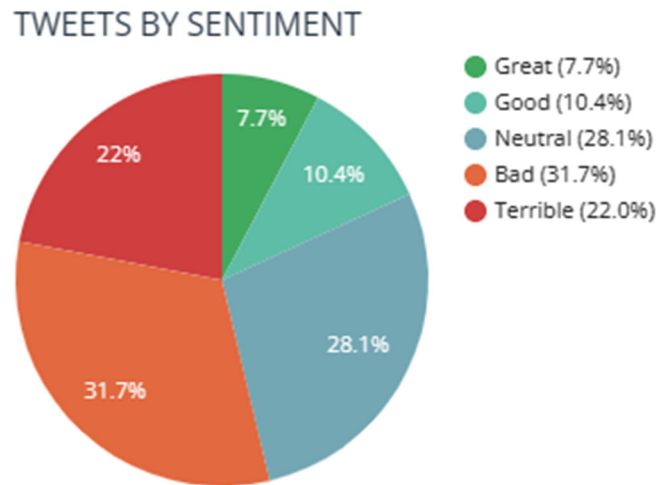
masyarakat dapat mengikuti perkembangan militer, melihat rekaman drone, dan berdiskusi tentang peristiwa tersebut di media sosial. Masyarakat Azerbaijan juga aktif dalam menyuarakan pendapat mereka di platform media sosial dengan menggunakan tagar yang menyoroti tindakan agresi dari pihak Armenia. Di sisi lain, ada juga masyarakat Azerbaijan yang siap berjuang demi bangsa dan tanah air dengan penuh semangat dan pengorbanan. Mereka tumbuh dengan ingatan akan tanah yang hilang, kekejaman yang terjadi, dan permusuhan bersejarah dengan Armenia. Pengalaman ini tertanam dalam diri mereka secara mendalam. Banyak masyarakat Azerbaijan percaya bahwa penyelesaian konflik semacam ini akan memakan waktu yang lama, karena salah satu pihak tetap bertahan untuk mempertahankan wilayahnya sementara pihak Armenia juga memperjuangkan klaim wilayah yang sama. Namun, mereka tetap berharap agar konflik dapat berakhir secara damai secepat mungkin untuk menghindari lebih banyak korban jiwa (Arinawati,2021).

Perang Nagorno-Karabakh mendapatkan respons yang cepat dari masyarakat global, termasuk selebriti internasional, yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat mereka. Banyak tokoh publik yang secara aktif berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat mereka di platform media sosial masing-masing, dan dengan tegas menyatakan dukungan mereka kepada salah satu negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Salah satu contohnya adalah Pakistan, yang menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan Azerbaijan. Pakistan secara konsisten menunjukkan dukungannya kepada Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh, baik melalui pernyataan langsung maupun melalui media sosial. Tweet dari Kementerian Luar Negeri Pakistan mendapatkan banyak komentar dan mendapat

dukungan yang luas dari warga Pakistan terhadap Azerbaijan. (Arinawati,2021)

Tabel 2.1

Tweet berdasarkan dari Sentimen Publik

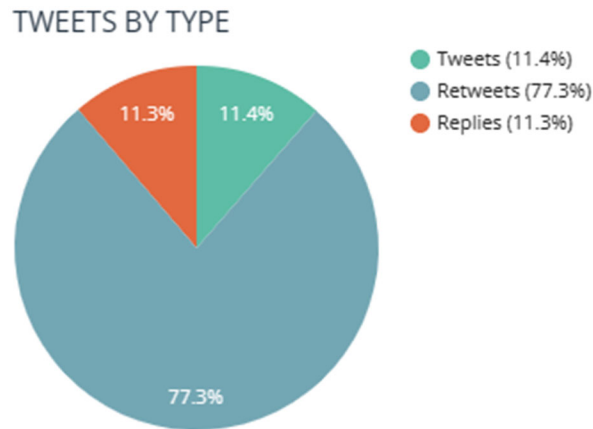


Berdasarkan data diagram diatas, mengungkapkan bahwa persentase tweet dengan sentimen publik "Bad" mencapai 31,7%. Hal ini menunjukkan adanya tingkat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan yang signifikan dalam sentimen publik terkait subjek atau topik yang sedang dibahas. Sedangkan, tweet sentimen publik paling ada pada tingkat "Great" mencapai 7,7%, berdasarkan data yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian pengguna yang menyampaikan penilaian positif atau kepuasan terkait subjek atau topik yang sedang dibahas.

(Sumber : Penulis, 2023)

Tabel 2.2

Diagram total tweet yang diolah selama konflik



(Sumber : Penulis, 2023)

Berdasarkan data di atas, persentase total tweet yang diolah pada saat konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020 paling tinggi pada tingkat "Retweet" mencapai 77,3%. Hal ini menunjukkan tingkat pengulangan dan penyebaran kembali informasi yang tinggi dalam sentimen publik terkait konflik tersebut. Banyak pengguna Twitter yang memilih untuk membagikan kembali atau menyebarkan tweet yang berhubungan dengan konflik tersebut. Sedangkan persentase total tweet yang diolah pada saat konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020 paling rendah ada pada tingkat "Replies" sebesar 11,3%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tweet yang direspon secara langsung dengan balasan atau tanggapan terhadap tweet lain dalam konteks konflik tersebut relatif lebih rendah. Dapat diasumsikan bahwa ada lebih sedikit interaksi langsung atau dialog antara pengguna Twitter terkait konflik Nagorno-Karabakh tersebut.

Gambar 2.1 Tweet Dukungan oleh Armenia #RecognizeArtsakh

follow		@quaintrelle_ It's Terry	Bulgaria	26,119	772	2,742	11.24 years	63
		"Екзистенциалист в луксозен хотел" "Шампанско-революционер" "Класен песимист" #RecognizeArtsakh AM #FreePalestine PS Never Forget #YazidiGenocide *						
follow		@SuzyTer Suzy		25,870	2,039	1,058	10.44 years	53
		AMUS* #RecognizeArtsakh • ❤️💙❤️						
follow		@ChrisKhach Christopher Khachadour #StopArtsakhBlockade	Հիլи	26,133	1,451	4,564	7.41 years	66
follow		@Lori_Hay Lori	Paris / Yerevan	25,244	580	716	10.03 years	52
		Մայրաքաղաք Երևան AM Baby IDE 🇧🇪 #RecognizeArtsakh #ArtsakhStrong						
follow		@bigdavo12 Notorious		24,450	370	524	9.66 years	32
		God bless our troopsAMUS#RecognizeArmenianGenocide #RecognizeArtsakh						
follow		@Cbertucci Cass Bertucci	Usually Toronto, I travel alot	22,985	535	403	13.81 years	45
		#StandWithArmenia #StopAzerbaijaniAggression #STOPAliyev #FreeArmenianPOWs #FreeArmenianHostages #DefendArtsakh #RecognizeArtsakh #SanctionAzerbaijan						
follow		@YanickYvan Yanick Ivanyan AM	Elx	21,063	984	2,177	12.08 years	62
		Com. Audiovisual y Periodismo UMH-UGR 🇪🇸 Obrero de la comunicación. He pasado por @la_ser e @informacion_es #RecognizeArtsakh AM						
follow		@Lily_Ray Lily Ray #StopArtsakhBlockade	Canada	20,158	799	1,498	2.27 years	62
		Speak up the #Truth, Stand up for #Justice #RecognizeArtsakh AM #StandWithArtsakh #StopArtsakhBlockade RT# endorsements						
follow		@arminkaaa Armine	Los Angeles, CA 🇺🇸	19,951	744	491	13.66 years	49
		Epidemiologist by 🧐, martial artist by 🥋 #BlackLivesMatter #RecognizeArtsakh						

Berdasarkan data diatas, didapatkan hasil bahwa banyak dukungan publik terhadap Armenia menggunakan tagar #RecognizeArtaskh dengan harapan bahwa publik dapat mendukung dan mengenali Armenia melalui tweet-tweet yang dibuat . Tagar #RecognizeArtsakh (Akui Artsakh) yang digunakan oleh publik Armenia mencerminkan upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap wilayah yang mereka sebut sebagai Artsakh, yang juga dikenal sebagai Nagorno-Karabakh. Publik Armenia berpendapat bahwa Artsakh adalah bagian integral dari wilayah mereka dan bahwa pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan legitimasi Artsakh penting untuk memperjuangkan hak-hak politik dan keamanan penduduk di wilayah tersebut.

Dalam konteks konflik Nagorno-Karabakh, publik Armenia menggunakan tagar ini untuk memperjuangkan dukungan global dan meminta negara-negara lain untuk mengakui wilayah Artsakh sebagai entitas independen atau sebagai bagian dari Armenia. Mereka berharap bahwa pengakuan internasional akan membantu memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dan penyelesaian konflik.

Penggunaan tagar ini juga dapat mencerminkan aspirasi dan harapan publik Armenia

untuk menjaga keamanan, hak-hak, dan identitas budaya masyarakat di wilayah Artsakh. Tagar tersebut bertujuan untuk menyuarakan kepentingan mereka dan menghasilkan dukungan luas untuk perjuangan mereka dalam konteks konflik Nagorno-Karabakh.

Gambar 2.2 Tweet Dukungan oleh Azerbaijan #StopArmenianAgression

Showing 1 - 50 of 273 results (order by relevance)

No filters	screen name	real name	tweets	following	followers	account age	Social Authority	
follow		@atsushi_cat_boy никотай	they/he infj 2w1 злвф	41,883	183	103	3.11 years	62
 	AZUAKG ray of the hope: @mellinnww ! постоянный TW на ! : капс, мат, агрессию, ментальные расстройства, тревожность, еду #StopArmenianAgression							
follow		@NailkaQasanova azNailka Qasanovaaz	11, Dijon, FranceFR	9,318	1,912	699	2.71 years	41
 	azAzerbaijaniseAZTR#KarabaghestI AzerbaijanAZAZAZTR #KarabakhisAzerbaijanAZAZAZTR #StopArmenianAgression #StopArmenianTerror							
follow		@mykidrauhvirus Karabakh az	Azerbaijan	8,694	1,047	1,862	10.34 years	23
 	KARABAKH IS AZERBAIJAN #STOPARMENIANTERRORISM #STOPARMENIANGAGGRESSION #STOPARMENIANOCCUPATION #DONTBELIEVEARMENIA							
follow		@Aygün47430054 Aygün Farzaliyeva	Los Angeles, CA	8,003	1,051	152	2.81 years	40
 	AZ #KarabakhisAzerbaijan!!!! #StopArmenianAgression!!!! #StandWithUkraine!!!! UAUAZUAZ UA							
follow		@sayqa_71 Ayten Meherremli	Azerbaijan	6,721	381	439	8.89 years	18
 	#KarabakhisAzerbaijan AZ #StopArmenianAgression #StopArmenianOccupation							
follow		@XLoreleiX noworries	Azerbaijan	6,596	254	201	13.07 years	48
 	https://t.co/8jbrqDj5jq #StopArmenianAgression							
follow		@Noora_Fikretli Noora	Azerbaijan	6,494	390	327	2.58 years	29
 	#KarabakhisAzerbaijan #VictoriousAzerbaijaniHeroes #DontBelieveArmenia #StopArmenianAgression							
follow		@sehla_al az Starry girl Shehla	Azerbaijan	5,955	1,944	808	1.71 years	37

Berdasarkan data diatas, didapatkan hasil bahwa dengan tagar #StopArmenianAgression sangat banyak ditemukan . Hal ini menunjukkan publik tidak ingin Armenia melakukan suatu tindakan yang bertujuan menyakiti masyarakat Azerbaijan . Tagar #StopArmeniaAgression (Hentikan Agresi Armenia) yang digunakan oleh publik Azerbaijan mungkin merupakan ekspresi dukungan terhadap Azerbaijan dan penolakan terhadap tindakan agresi yang dianggap dilakukan oleh Armenia dalam konteks konflik Nagorno-Karabakh. Tagar

tersebut dapat mencerminkan persepsi publik Azerbaijan bahwa Armenia melakukan tindakan agresif atau invasi terhadap wilayah Azerbaijan.

Publik Azerbaijan menggunakan tagar tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan pesan mereka kepada dunia internasional dan mendapatkan perhatian terhadap situasi yang mereka anggap tidak adil. Mereka berharap bahwa dengan menggulirkan tagar ini, akan ada upaya yang lebih besar dari komunitas internasional untuk menghentikan apa yang mereka lihat sebagai agresi dari pihak Armenia.

BAB 3

DIPLOMASI DIGITAL AZERBAIJAN DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK TERHADAP KONFLIK NAGORNO- KARABAKH

3.1 Agenda Setting

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedang berlangsung saat ini berjalan dengan cepat. Hal ini mengakibatkan banyak negara, termasuk Azerbaijan, harus beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai tujuan nasional mereka. Agenda Setting merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Azerbaijan untuk mengatur topik pembahasan dengan audiens target mereka melalui platform media sosial. Penyebaran informasi selalu menjadi tugas utama dalam diplomasi public. Untuk diplomasi baru, menginformasikan adalah prasyarat untuk berinteraksi karena dialog nyata harus didasarkan pada topik keakraban, pemahaman bersama dan kepentingan bersama. Tujuan utama dari dimensi ini adalah membantu citra negara untuk audiens asing mengarahkan perhatian yang terakhir ke topik tertentu sambil mengesampingkan berita yang lebih baik. Diplomat dengan demikian dapat membangun isu dengan menonjol dan layak untuk mendapat perhatian audiens dengan memberikan informasi yang relevan tentang isu itu.

Berkaitan dengan diplomasi digital Azerbaijan dalam membentuk opini public terhadap Nagorno-Karabakh, pemerintah telah menjadikan isu global dan internasional daripada konflik antara negara sebagai agenda publik yaitu dengan membuat konten yang berkaitan dengan mendukung negara Azerbaijan dalam konflik

ini . Untuk memahami bagaimana diplomasi digital Azerbaijan menggunakan Twitter sebagai platform *Agenda Setting*, peneliti mengkategorikan semua posting yang dikirim selama jangka waktu yang dipilih berdasarkan topik awal. Melihat lebih dekat dengan akun Twitter mengungkapkan pola dan keteraturan yang penting. Pertama, frekuensi postingan harian, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang secara mengejutkan memberikan tulisan yang stabil pada postingan twitter. Selama perang 44 hari pada tahun 2020 Ilham Aliyev aktif menggunakan twitter. Jelas, memposting di Twitter menjadi kegiatan rutin bagi Presiden Azerbaijan yang menunjukkan bahwa Presiden yang berdedikasi harus bertanggung jawab untuk menjalankan tugas ini.

Gambar 3.1 Tweet Tahir Mirkishili selaku Ketua Komite Kebijakan Ekonomi Azerbaijan



Sumber: Tweet dari Tahir Mirkishili, 2020

Dari gambar di atas, dijelaskan bahwa Tahir Mirkishili, selaku Ketua Komite Kebijakan Ekonomi Azerbaijan, dengan tegas menyampaikan bahwa angkatan bersenjata Armenia dengan sengaja menargetkan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur sipil yang berada dalam keadaan damai di sepanjang garis kontak wilayah Nagorno-Karabakh di Azerbaijan. Hal ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan norma-norma internasional yang melindungi kehidupan dan keamanan warga sipil di daerah konflik.

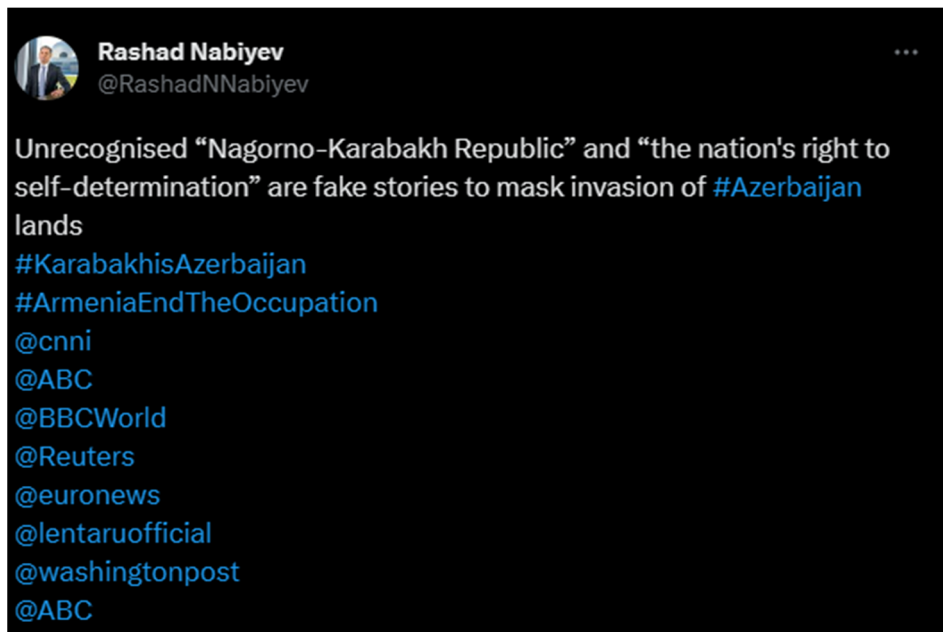
Gambar 3.2 Sahiba Gafarova selaku Ketua Majelis Nasional Azerbaijan



Sumber: Tweet dari Sahiba Gafarova, 2020

Dari gambar diatas, penulis berpendapat bahwa *tweet* tersebut mengungkapkan keyakinan bahwa pihak Azerbaijan telah berhasil membawa perdamaian ke wilayah tersebut dan mengakhiri pendudukan Armenia. Ini mencerminkan pandangan dari sudut pandang pihak yang mendukung Azerbaijan. Pernyataan bahwa Armenia "menandatangani perjanjian penyerahan diri" menunjukkan bahwa penulis tweet memandang Armenia sebagai pihak yang kalah dalam konflik dan dipaksa untuk menyerah. Ini mencerminkan sudut pandang pihak Azerbaijan yang percaya bahwa mereka mencapai kemenangan mutlak dalam konflik tersebut. Penutup tweet dengan menyatakan "#Karabakh adalah Azerbaijan" menegaskan klaim Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh sebagai bagian integral dari negara mereka. Ini mencerminkan pandangan yang dianut oleh pihak Azerbaijan dan merupakan posisi resmi mereka dalam konflik tersebut.

Gambar 3.3 Tweet dari Rashad Nabiyev selaku Menteri Pengembangan Digital dan Transportasi Republik Azerbaijan



Sumber: Tweet dari Rashad Nabiyeu, 2020

Dari gambar diatas, penulis berpendapat bahwa weet tersebut menyatakan bahwa Republik Nagorno-Karabakh adalah "cerita palsu". Ini menunjukkan pandangan Rashad Nabiyeu yang menolak pengakuan atau status teritorial Republik Nagorno-Karabakh, yang merupakan wilayah yang diperebutkan antara Azerbaijan dan Armenia. Pernyataan bahwa klaim "hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri" adalah "cerita palsu untuk menutupi invasi atas tanah Azerbaijan" menunjukkan keyakinan Rashad Nabiyeu bahwa tindakan Armenia di Nagorno-Karabakh merupakan invasi atau agresi terhadap Azerbaijan. Ini mencerminkan pandangan dari sudut pandang pihak Azerbaijan atau pendukung Azerbaijan yang mengecam tindakan Armenia dalam konflik tersebut. Penulis juga berpendapat bahwa Tweet tersebut mengartikan konflik Nagorno-Karabakh sebagai invasi Armenia atas tanah Azerbaijan, yang menunjukkan penilaian yang kuat dari penulis terhadap konflik

tersebut.

Gambar 3.4 Tweet dari Presiden Azerbaijan



Sumber: Tweet dari Ilham Aliyev, 2020

Gambar 3.5 Tweet dari Pusat Jerman Kaukasus Selatan



Sumber : (Tweet Pusat Jerman Kaukasus Selatan, 2020)

Tweet tersebut mengungkapkan bahwa penulis acara "Blockade" telah menemukan tesis eksklusif baru yang menyatakan bahwa "Tentara bayaran Polandia bertempur di Karabakh". Tweet tersebut juga mengirimkan pesan kepada warga Armenia untuk tetap tenang.

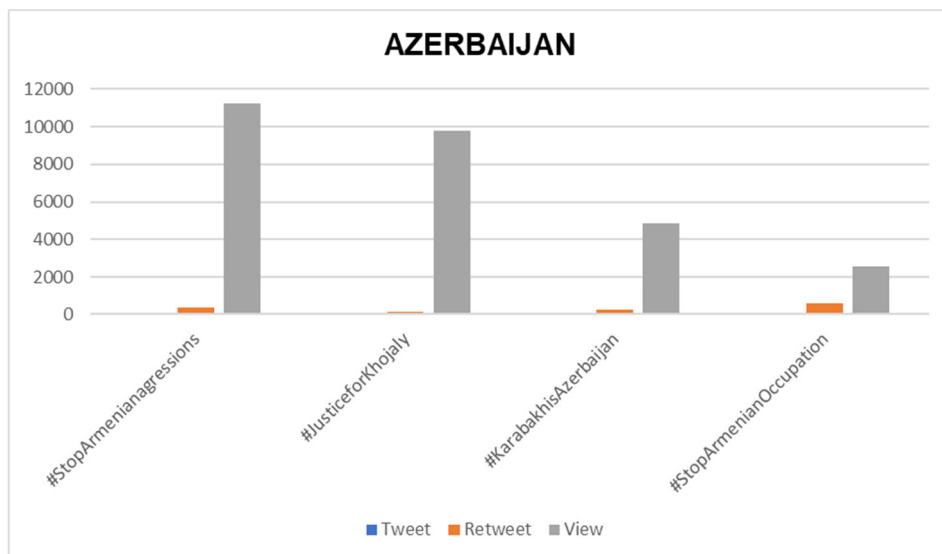
Gambar 3.3 Twit dari AZ-YA



Sumber : Tweet dari AZ-YA, 2020

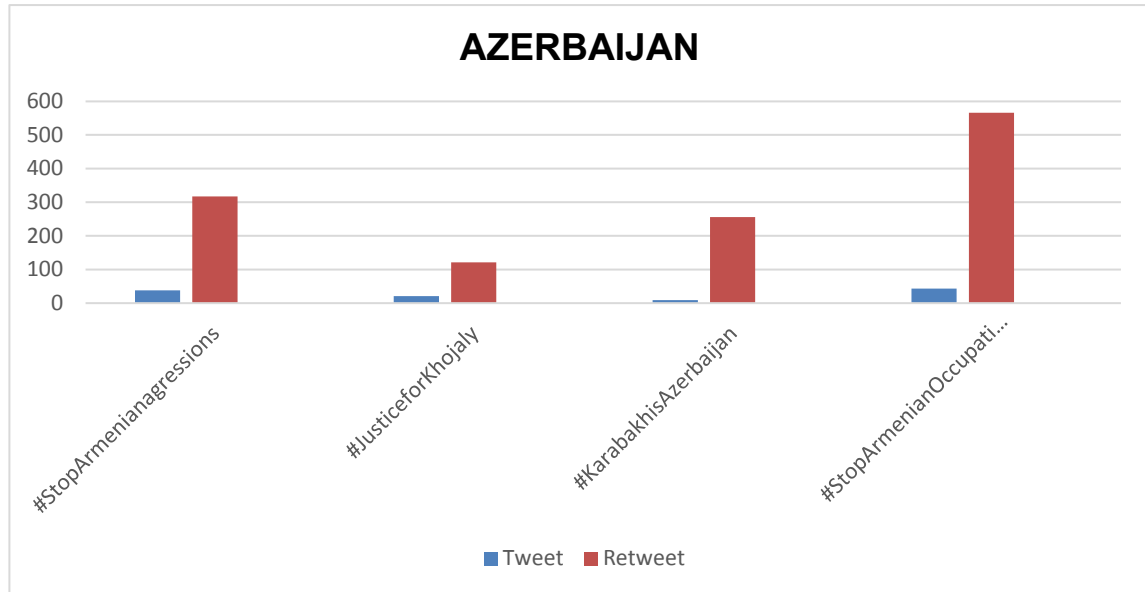
Tweet tersebut mengungkapkan bahwa anak-anak yang terkenal karena menjadi korban serangan rudal di Ganja oleh Armenia telah kembali ke lingkungan mereka. Pernyataan tersebut menekankan kekuatan dan ketahanan anak-anak tersebut.

Tabel 3.1 Data Topik Berita di Twitter dari September 2020



Sumber : Dibuat oleh (Penulis, 2023)

Tabel 3.2 Data Topik Berita di Twitter dari September 2020 berdasarkan Tweet



Sumber : Dibuat oleh (Penulis, 2023)

Dari data diatas, ada hal utama yang menarik penulis. topik yang dilakukan Azerbaijan di Twitter pada saat peperangan condong kepada pembelaan bahwa merekalah yang menjadi korban karena Armenia melakukan serangan kepada Azerbaijan . Hal ini terjadi karena pemerintah Azerbaijan dan pengguna social media dari Azerbaijan selama perang sering kali menggunakan tagar yang mencoba untuk menyebarkan propaganda yang sesuai dengan agenda politiknya selama perang Karabakh 2020.

Dari data diatas juga dapat disimpulkan, bahwa tagline yang paling sering dipakai adalah *#StopArmenianAggression* dengan total 11.475 *views*. Hal ini ditujukan atas Tindakan Armenia yang dilakukan pada Azerbaijan . Perilaku atau Tindakan yang dilakukan oleh Armenia menyebabkan Azerbaijan mengalami kerugian yang banyak

terutama korban jiwa, terutama pada wanita dan anak-anak serta hal ini juga membuat situasi menjadi tidak aman dan kondusif. Oleh karena itu tagline ini dibuat dengan harapan berdampak positif meminimalisir kejadian agresi yang dilakukan oleh Armenia.

Sedangkan untuk tagline yang kurang menarik perhatian publik adalah *#StopArmenianOccupation* dengan total 2.225 *views*, hal ini dikarenakan tujuan daripada tagline ini dibuat sama akan tujuan dibuatnya dari tagline *#StopArmenianAgression*. Sehingga tagline ini tertutupi kesannya dengan tagline tersebut. Padahal maksud daripada tagline ini dibuat juga sangat bagus, karena berasal dari keresahan warga sipil Azerbaijan mengenai pembersihan etnis tanpa henti dan pendudukan illegal atas tanah mereka oleh militer Armenia. Yang paling terkenal adalah pembantaian Khojaly, dimana 613 warga sipil Azerbaijan dibunuh dalam satu malam. Sejak saat itu, ada lebih dari 1 juta pengungsi dan warga sipil Azerbaijan yang menunggu untuk pulang ke Nagorno-Karabakh, menjadikan Azerbaijan sebagai salah satu negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia.

Dalam menjalankan diplomasi publiknya melalui Twitter, penulis melihat bahwa upaya Agenda Setting yang dilakukan telah berhasil menarik perhatian masyarakat internasional dengan baik. Namun, terdapat kekurangan dalam strategi yang diterapkan. Salah satu kekurangan tersebut adalah kurangnya keterlibatan tokoh publik Azerbaijan dalam interaksi dengan pengguna Twitter. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi Hikmet Hajiyev, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Luar Negeri Administrasi Kepresidenan, dalam berdiskusi dengan publik melalui tweetnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa para tokoh publik

harus aktif terlibat dalam diskusi dengan publik melalui tweet yang mereka posting. Hal ini penting karena keterlibatan aktif para tokoh publik dapat meningkatkan antusiasme publik dalam mengikuti perkembangan permasalahan yang ada.

3.2 *Presence-Expansion*

Aspek kedua dari dampak media sosial adalah Ekspansi Keberadaan. Jika pemerintah ingin memperluas hubungan yang baik dengan audiens internasional, langkah pertama yang harus diambil adalah "berada di luar sana" di platform publik yang relevan. Ekspansi Keberadaan merupakan tahap di mana agenda yang diusung telah sampai ke target, dan respons, reaksi, masukan, serta perspektif dari target (masyarakat) dapat terlihat. Bentuk respons, reaksi, masukan, dan perspektif dapat diamati melalui jumlah reposting dan komentar yang diterima dari target. Munculnya media sosial memperluas cakupan kehadiran diplomatic melalui ruang dan waktu. Sebagai contoh, Tim Penjangkauan Digital Departemen Luar Negeri telah secara langsung melibatkan warga Azerbaijan melalui postingan pesan tentang keadaan yang terjadi selama peperangan.

Gambar 3.6 Tweet dari Hikmet Hajiyev selaku Kepala Departemen Kebijakan Luar Negeri Administrasi Kepresidenan Azerbaijan



Sumber: Akun twitter, Hikmet Hajiyevev (Hajiyevev,2020)

Salah satu contoh dalam gambar di atas adalah cuitan di platform Twitter yang memberikan informasi tentang perkembangan situasi Nagorno-Karabakh selama periode perang. Dalam upaya diplomasi pada tahap ekspansi keberadaan (Bjola & Jiang, 2015), tanggapan, reaksi, masukan, dan perspektif dari masyarakat yang menerima informasi terkait situasi perang dapat diamati. Bentuk respons, reaksi, masukan, dan perspektif tersebut dapat dilihat melalui jumlah reposting dan komentar yang diterima oleh target. Cuitan Twitter tersebut merupakan contoh bagaimana masyarakat memberikan reaksi terhadap situasi tersebut.

Dalam era digital, ekspansi keberadaan menjadi faktor yang semakin penting bagi para diplomat dalam memperoleh perhatian terhadap suara mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Wichowski, kegagalan para diplomat untuk mengikuti perkembangan teknologi digital yang terus berubah dapat mengakibatkan penurunan kredibilitas dan otoritas mereka. Bukan hanya pesan yang tidak akan terdengar, namun mereka juga akan kalah bersaing dengan berbagai kampanye informasi yang bersaing.

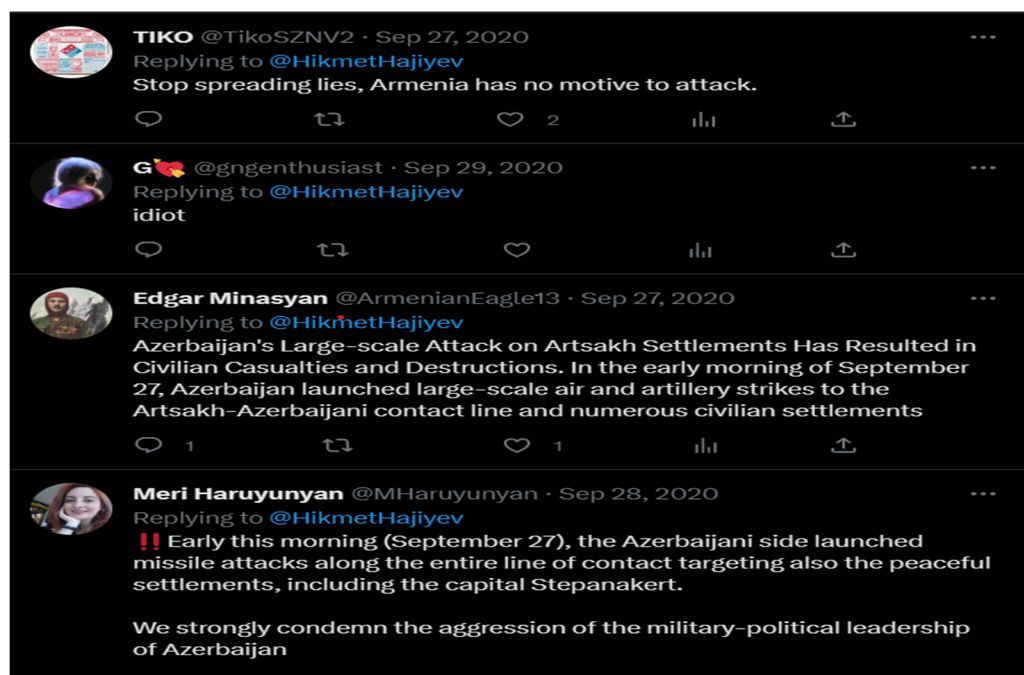
Gambar 3.7 Reaksi Publik yang sepakat terhadap Tweet Hikmet Hajiyevev selaku Kepala Departemen Kebijakan Luar Negeri Administrasi Kepresidenan Azerbaijan



Sumber: Akun twitter, Hikmet Hajiyevev (Hajiyevev,2020)

Gambar diatas, menjelaskan bahwa banyak simpatisan yang setuju dengan cuitan dari Hikmet Hajiyevev. Hal ini dikarenakan publik mengikuti gerakan militer, rekaman drone, dan mendiskusikan peristiwa tersebut.

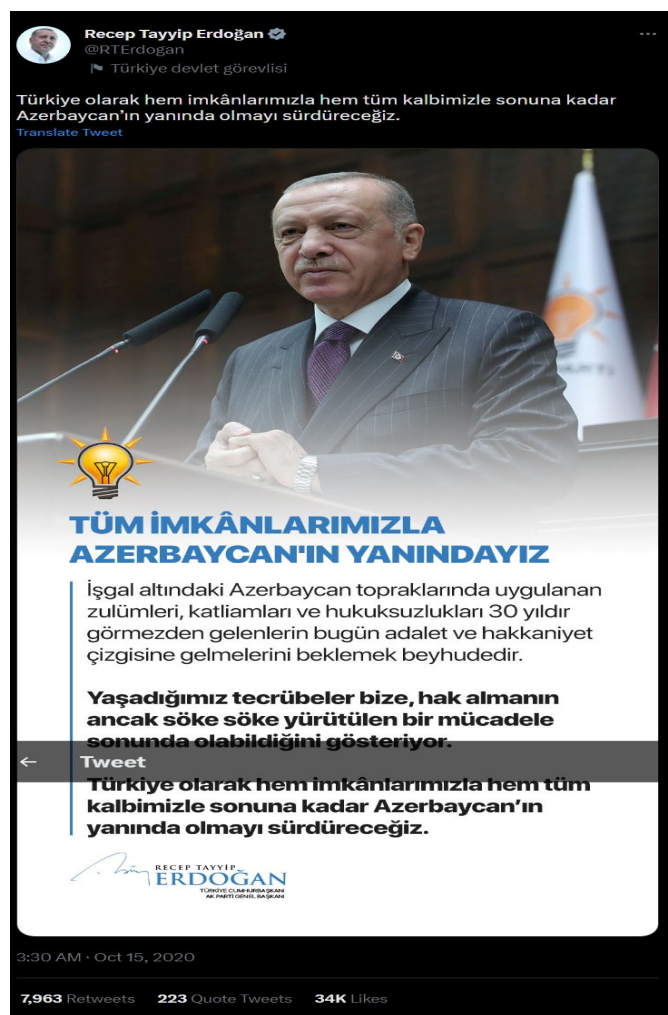
Gambar 3.8 Reaksi Publik yang tidak sepakat terhadap Tweet Hikmet Hajiyevev selaku Kepala Departemen Kebijakan Luar Negeri Administrasi Kepresidenan Azerbaijan



Sumber: Akun twitter, Hikmet Hajiye (Hajiye,2020)

Gambar diatas, menjelaskan bahwa ada juga yang tidak sepakat dengan cuitan dari Hikmet Hajiye karena diduga itu semua pembohongan publik belaka atau tuduhan berita palsu.

Gambar 3.9 Tweet Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 15 Oktober 2020



Sumber: Twitter Recep Tayyip Erdogan (Erdogan,2020)

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan juga di twitternya menunjukkan

dukungannya terhadap perjuangan Azerbaijan. Erdogan menulis di akunnya “ *Sebagai Turki, kami akan terus mendukung Azerbaijan dengan segala cara dan segenap hati kami.*”

Tweetnya Erdogan mendapatkan 34.000 *like*, 1.245 *comment*, dan 7.963 *retweet*. Dari Tweet ini 38iplomati lihat bahwa dukungan dari Erdogan juga disambut dengan antusias melihat banyaknya tanggapan tweet tersebut. Hal ini wajar mengingat kedekatan historis dan ras Turki dan Azerbaijan. Tweet dari Erdogan didukung oleh media sosial yang berasal dari Azerbaijan dan Turki.

Gambar 3.10 Tweet Government of Pakistan mengenai Pertemuan Presiden Pakistan Dr. Arif Alvi dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev



Sumber: Government of Pakistan, 2020

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa Tweet tersebut menyatakan bahwa Arif

Alvi, Presiden Pakistan, dan Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan, telah melakukan pertemuan di Baku. Hal ini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral antara kedua negara dan menyoroti hubungan politik tingkat tinggi antara mereka. Tweet tersebut mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral antara Pakistan dan Azerbaijan. Ini menunjukkan bahwa kedua pemimpin negara tersebut memiliki minat yang kuat dalam memperkuat kerjasama dan kolaborasi di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan keamanan. Dalam konteks konflik Nagorno-Karabakh, Pakistan telah menyatakan dukungannya terhadap Azerbaijan secara politik dan diplomatik. Beberapa pejabat pemerintah, politisi, dan tokoh publik Pakistan dapat menggunakan Twitter untuk menyuarakan dukungan mereka kepada Azerbaijan, mengutuk pendudukan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh, dan menyampaikan solidaritas dengan rakyat Azerbaijan.

Gambar 3.11 Tweet Imran Khan selaku Perdana Menteri Republik Islam Pakistan



Sumber: Tweet dari Imran Khan, 2020

Dari gambar diatas, dijelaskan bahwa weet tersebut mengungkapkan ucapan selamat kepada Presiden Azerbaijan dan rakyat Azerbaijan di Hari Kemerdekaan mereka. Hal ini mencerminkan pengakuan dan apresiasi terhadap perayaan penting dalam sejarah Azerbaijan. Tweet tersebut juga memberikan penghormatan kepada pasukan Azerbaijan yang dinyatakan telah mempertahankan integritas teritorial mereka dengan gagah berani. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap peran dan komitmen pasukan Azerbaijan dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Dukungan Pakistan terhadap upaya Azerbaijan untuk menyelesaikan masalah Nagorno-Karabakh sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Hal ini menunjukkan konsistensi Pakistan dalam mendukung Azerbaijan dalam konteks konflik Nagorno-Karabakh dan pengakuan terhadap kerangka hukum internasional yang relevan.

3.3 *Conversation-Generating*

Pada saat ini, teknologi digital sangat mempengaruhi proses komunikasi. Media sosial semakin mempermudah proses komunikasi terutama yang bersifat dua arah (Sevin & Ingenhoff, 2018). Setelah melakukan digital agenda-setting, aktor diplomasi perlu melakukan Conversation-Generating. Menurut (Bjola dan Jiang, 2015), *Conversation-Generating* merupakan upaya diplomat untuk melibatkan publik dalam berbagai diskusi isu yang telah diagendakan. Sebagian besar tujuan diplomasi publik adalah untuk menciptakan jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi dua arah ini tidak hanya berupa transfer pesan dari pengirim ke audiens tetapi juga diperlukan proses mendengarkan dan memantau reaksi atau non-reaksi dari audiens (Payne, 2011). Komunikasi dua arah ini juga

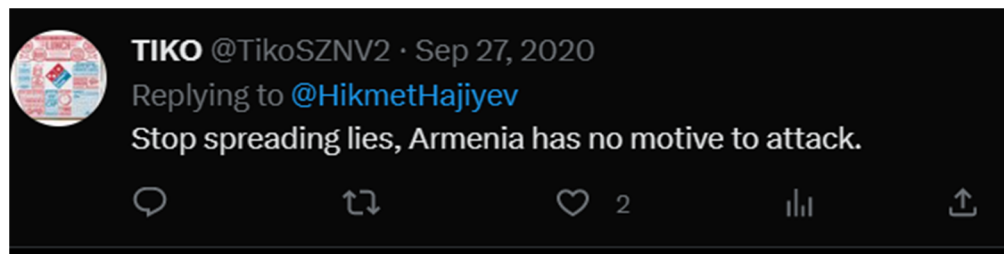
memungkinkan para diplomat untuk menyesuaikan kembali fokus agenda mereka, mengoreksi kesalahan informasi serta memperkuat hubungan dengan audiens (Bjola dan Jiang, 2015).

Menurut (Alexis Wichowski, 2015) untuk menggunakan media sosial dengan baik setiap diplomat seharusnya tidak hanya mengunggah konten press release. Para diplomat ini harus lebih terlibat dan terikat dengan para audiens dengan cara mengunggah konten yang bersifat menarik. Untuk dapat melakukan *Conversation-Generating* di media sosial secara menyeluruh, actor diplomasi perlu menciptakan strategi yang efektif. Presiden Azerbaijan dan Sekretaris Presiden Azerbaijan berusaha menciptakan konten-konten yang secara personal disukai publik Azerbaijan dan publik dunia untuk mempermudah proses dialog terutama yang terkait dengan Nagorno-Karabakh. Dengan demikian, keterlibatan publik dalam berbagai diskusi atau dialog di Twitter.

Dalam *Conversation-Generating* ini, seperti melakukan sosialisasi informasi status kondisi Nagorno-Karabakh selama peperangan melalui twitter tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Nagorno-Karabakh selama peperangan. Pada bagian ini, penulis berfokus pada pemberian umpan balik kepada audiens. Hal ini merupakan 41iploma penting dalam proses percakapan karena tanpanya, proses yang berulang kemungkinan besar akan berhenti setelah satu kali percakapan. Selanjutnya, agensi tersebut memberi umpan balik kepada pengguna Twitter lainnya dalam dua bentuk utama; dengan memposting ulang komentar pada feed yang diberi tag (menggunakan fungsi @), atau dengan mengomentari tanggapan pengguna Twitter terhadap umpan Twitter mereka .

Sehubungan dengan cara umpan balik yang pertama, penulis menemukan bahwa tidak ada satupun dari kedua akun diplomatic memposting ulang atau mengomentari akun Twitter yang menandai mereka dalam jangka waktu yang dipilih (27 September 2020 – 10 November 2020) . Penulis juga tidak menemukan bukti kuat adanya tanggapan resmi terhadap pernyataan pengguna Twitter.

Gambar 3.12 Respon negative dari pengguna Twitter terhadap Tweet yang diposting oleh Hikmet Hajiyeu



Sumber: Reply Tweet dari Hikmet Hajiyeu, 2020

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa ketika satu postingan dari Sekretaris Presiden Azerbaijan Hikmet Hajiyeu yang meinformasikan mengenai pemukiman Azerbaijan ditembaki oleh angkatan bersenjata Armenia, seorang pengguna yang tertarik memberikan pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh Hikmat Hajiyeu tidak benar adanya . Hal ini juga dapat dilihat pada Tweet yang dibuat oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.

Gambar 3.13 Respon Negative dari pengguna Twitter terhadap Tweet yang diposting oleh Ilham Aliyev

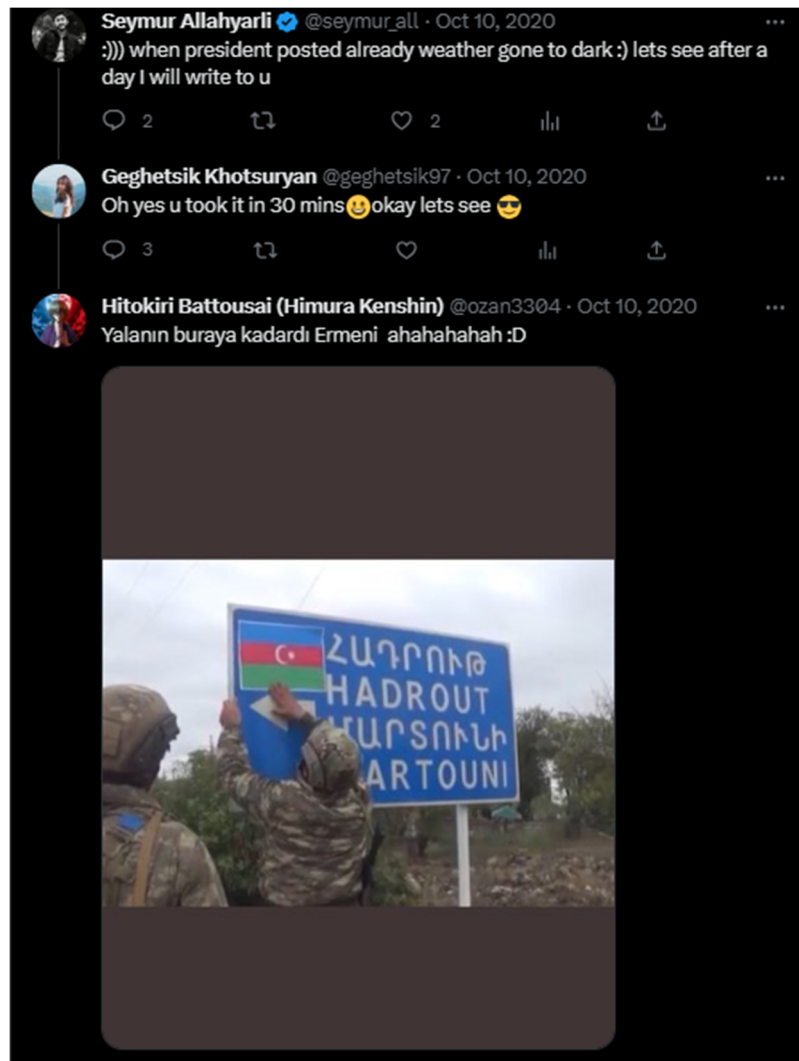


Sumber: Reply Tweet dari Ilham Aliyev, 2020

Berdasarkan gambar diatas juga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanggapan atau respon dari Tokoh Diplomatik dari pihak Azerbaijan mengenai hal tersebut. Temuan-temuan ini mungkin mengecewakan bagi mereka yang membela Azerbaijan, karena hal ini menimbulkan keraguan tentang sejauh mana publik asing mampu melibatkan para diplomat dalam percakapan dua arah. Akan tetapi, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dimensi interaktif media sosial memiliki cakupan aplikasi yang lebih luas, dengan implikasi diplomatic yang lebih luas. Sampai batas tertentu, strategi ini menjelaskan mengapa diplomasi publik Azerbaijan di media sosial Twitter lebih berfokus pada penyediaan informasi daripada menghasilkan percakapan.

Gambar 3.14 Respon Negative dari Pengguna Twitter terhadap Tweet yang diposting oleh Ilham Aliyev





Sumber: Reply Tweet dari Ilham Aliyev, 2020

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa pengguna tweet dengan nama Geghetsik Khotsuryan kontra dengan pernyataan yang diberikan Ilham Aliyev selaku Presiden Azerbaijan. Tweet tersebut secara tegas menyatakan bahwa "Karabakh adalah Azerbaijan". Perspektif yang tidak sepakat mungkin mempertanyakan klaim ini dan menyatakan bahwa status Nagorno-Karabakh masih menjadi sengketa internasional yang belum diselesaikan. Pandangan ini dapat berpihak kepada klaim Armenia terhadap wilayah tersebut.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis tentang bagaimana diplomasi digital Azerbaijan mempengaruhi opini publik mengenai sengketa Nagorno-Karabakh melalui tiga dimensi, yaitu Agenda setting, Presence expansion, dan Conversation-generating, penulis berpendapat bahwa upaya diplomasi publik Azerbaijan melalui Twitter telah sesuai dengan klasifikasi dimensi diplomasi digital tersebut. Strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Azerbaijan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi bukti konkret dari hal ini. Untuk memperjelas, berikut adalah penjelasan yang lebih ringkas.

Dimensi pertama yaitu *agenda setting* yang merupakan salah satu alat bagi Azerbaijan untuk mengatur agenda diskusi dengan target audiens mereka menggunakan platform media sosial. Melalui dimensi ini, terlihat bagaimana pemerintah Azerbaijan memanfaatkan media untuk penyebaran informasi kondisi terkini terkait perang Nagorno-Karabakh. Tujuan daripada dimensi ini adalah membantu citra negara untuk audiens asing mengarahkan perhatian yang terakhir ke topik tertentu sambil mengesampingkan berita yang lebih baik. Diplomat dengan demikian dapat membangun isu dengan protocol dan layak untuk mendapat perhatian audiens dengan memberikan informasi yang relevan tentang isu itu .

Dari data yang telah didapatkan, ada hal utama yang menarik penulis, topik yang dilakukan Azerbaijan di Twitter pada saat peperangan condong kepada

pembelaan bahwa merekalah yang menjadi korban karena Armenia melakukan serangan kepada Azerbaijan . Dari data yang telah didapatkan juga dapat disimpulkan, bahwa tagline yang paling sering dipakai adalah *#StopArmenianAggressions* dengan total 11.475 views. Hal ini ditujukan atas tindakan Armenia yang dilakukan pada Azerbaijan. Perilaku yang dilakukan Armenia menyebabkan Azerbaijan mengalami kerugian yang banyak terutama korban jiwa, yang dialami oleh wanita dan anak-anak serta hal ini juga membuat situasi menjadi tidak aman dan kondusif . Oleh karena itu tagline ini dibuat dengan harapan berdampak positif menimalisir kejadian agresi yang dilakukan oleh Armenia.

Dimensi kedua adalah Ekspansi Kehadiran, yang menunjukkan sejauh mana diplomat Azerbaijan hadir di antara publik global. Pemerintah memiliki tujuan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan audiens asing, dan yang pertama-tama perlu dilakukan adalah menjadi "terlihat" di ruang publik yang relevan. Diplomasi ini tidak langsung menghasilkan citra yang baik atau opini yang menguntungkan, tetapi tanpa paparan yang memadai, strategi diplomasi publik pada akhirnya akan mengalami kegagalan. Di era digital, Ekspansi Kehadiran menjadi kondisi yang semakin krusial bagi para diplomat dalam membuat suara mereka didengar. Ekspansi Kehadiran adalah tahap di mana agenda yang telah direncanakan telah disampaikan kepada target, dan kemudian dapat terlihat seperti apa tanggapan, reaksi, masukan, atau perspektif dari yang ditargetkan (masyarakat). Bentuk tanggapan, reaksi, masukan, atau perspektif dapat diamati melalui jumlah reposting atau komentar dari target.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa banyak pendukung yang setuju dengan cuitan Hikmet Hajiyev. Hal ini disebabkan karena publik

mengikuti perkembangan gerakan militer, rekaman drone, dan terlibat dalam diskusi tentang peristiwa tersebut. Namun, ada juga yang memberikan reaksi negatif terhadap cuitan Hikmet Hajiyev, dengan dugaan bahwa semua yang diinformasikan olehnya hanyalah pembohongan atau berita palsu. Dari data yang diperoleh, juga diketahui bahwa Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan Azerbaijan melalui akun Twitter-nya. Erdogan menulis, "Sebagai Turki, kami akan terus mendukung Azerbaijan dengan segala cara dan sepenuh hati kami". Tweet Erdogan ini mendapatkan 34.000 suka, 1.245 komentar, dan 7.963 retweet. Dari tweet ini, dapat dilihat bahwa dukungan dari Erdogan juga disambut antusias dengan banyaknya tanggapan terhadap tweet tersebut. Hal ini wajar mengingat kedekatan sejarah dan etnis antara Turki dan Azerbaijan. Tweet Erdogan juga didukung oleh pengguna media sosial dari Azerbaijan dan Turki.

Dimensi ketiga yaitu *Conversation-Generating*, merupakan upaya diplomat untuk melibatkan publik dalam berbagai diskusi isu yang telah diagendakan. Sebagian besar tujuan diplomasi publik adalah untuk menciptakan jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi dua arah ini tidak hanya berupa transfer pesan dari pengirim ke audiens tetapi juga diperlukan proses mendengarkan dan memantau reaksi atau non-reaksi dari audiens. Komunikasi dua arah ini juga memungkinkan para diplomat untuk menyesuaikan kembali fokus agenda mereka, mengoreksi kesalahan informasi serta memperkuat hubungan dengan audiens

Dalam *Conversation-Generating* ini, seperti melakukan sosialisasi informasi status kondisi Nagorno-Karabakh selama peperangan melalui twitter tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Nagorno-Karabakh selama peperangan. Pada bagian ini,

penulis berfokus pada pemberian umpan balik kepada audiens. Hal ini merupakan langkah penting dalam proses percakapan karena tanpanya, proses yang berulang kemungkinan besar akan berhenti setelah satu kali percakapan.

Sehubungan dengan cara umpan balik yang pertama, penulis menemukan bahwa tidak ada satupun dari kedua akun diplomatic memposting ulang atau mengomentari akun Twitter yang menandai mereka dalam jangka waktu yang dipilih (27 September 2020 – 10 November 2020) . Penulis juga tidak menemukan bukti kuat adanya tanggapan resmi terhadap pernyataan pengguna Twitter.

Dari data yang telah didapatkan disimpulkan bahwa ketika satu postingan dari Sekretaris Presiden Azerbaijan Hikmet Hajiyev yang meinformasikan mengenai pemukiman Azerbaijan ditembaki oleh angkatan bersenjata Armenia, seorang pengguna yang tertarik memberikan pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh Hikmat Hajiyev tidak benar adanya . Hal ini juga dapat dilihat pada Tweet yang dibuat oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Selain itu, disimpulkan bahwa tidak ada tanggapan atau respon dari Tokoh Diplomatik dari pihak Azerbaijan mengenai hal tersebut .Temuan-temuan ini mungkin mengecewakan bagi mereka yang membela Azarbaijan, karena hal ini menimbulkan keraguan tentang sejauh mana publik asing mampu melibatkan para diplomat dalam percakapan dua arah. Akan tetapi, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dimensi interaktif media sosial memiliki cakupan aplikasi yang lebih luas, dengan implikasi diplomatik yang lebih luas. Sampai batas tertentu, strategi ini menjelaskan mengapa diplomasi publik Azerbaijan di media sosial Twitter lebih berfokus pada penyediaan informasi daripada menghasilkan percakapan.

4.2 Rekomendasi

Penulis mengakui bahwa penelitian ini memiliki beberapa kekurangan dan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian di masa mendatang. Terutama, penelitian ini memiliki batasan utama dalam objek penelitian yang hanya terbatas pada Twitter dan cuitan yang diakses pada tahun 2020. Oleh karena itu, sangat memungkinkan untuk penelitian selanjutnya untuk menggunakan objek penelitian yang berbeda selain Twitter dan juga memperluas tahun penelitian yang dilibatkan.

Oleh karena itu, harapannya adalah bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah dalam mengembangkan diplomasi publik mereka melalui media sosial, terutama melalui penggunaan Twitter. Selain itu, penulis berharap bahwa penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi para peneliti untuk mempelajari bagaimana diplomasi digital Azerbaijan mempengaruhi opini publik mengenai sengketa Nagorno-Karabakh. Lebih luas lagi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bjola, C. Dan Jiang, L. "Social Media And Public Diplomacy: A Comparative Analysis Of The Digital Diplomatic Strategies Of The EU, US And Japan In China," Dalam Buku Digital Diplomacy: Theory And Practice. NY: Routledge, 2015

Bjola, Corneliu, And Marcus Holmes. "Digital Diplomacy Theory And Practice". New York: Routledge, 2015.

Bogdan, Robert C. "*Sari Knop Biklen, Qualitative Reseach for Eduication.*" (1982).

Iskandar. "Metodologi Penelitian Kualitatif" Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Jafarova, Esmira. Conflict resolution in South Caucasus: Challenges to international efforts. Lexington Books, 2014.

Kristiani, Ensi Adistya. "Keterlibatan Rusia Dalam Upaya Resolusi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan 2008." (2013).

Leckie, Chanda Allana. The Nagorno-Karabakh Conflict. Diss. Virginia Tech, 2005.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja." *Rosdakarya. T. Hani* (2005).

Nikkar-Esfahani, Hamidreza. *The Nagorno Karabakh Conflict. Causes of the conflict and obstacles to conflict resolution.* Diss. University of Bradford, 2013.

Pamment, James. *New public diplomacy in the 21st century: A comparative study of policy and practice.* Routledge, 2012.

Qurbanov, Ilqar Fuad. *The Politic Of Pipeline Diplomacy And Energy Security.* 2008

Jurnal :

Cornell, S. E. "The Nagorno-Karabakh Conflict",1999. Uppsala : Uppsala University.

Hallams, Ellen. Digital Diplomacy: The Internet, The Battle For Ideas & US Foreign Policy. Political Science. No.4 (2010) : 538-616

Hartati, Anna Yulia. Konflik Azerbaijan Dengan Armenia Atas Wilayah Nagorno-Karabakh Dalam Konteks Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum* .

- McCombs, Maxwell, and Amy Reynolds. "News influence on our pictures of the world." *Media effects*. Routledge, 2002. 11-28.
- Payne, Gregory, Efe Sevin, and Sara Bruya. "Grassroots 2.0: Public diplomacy in the digital age." *Comunicação Pública* 6.n10 (2011): 45-70.
- Qarayeveva, Leyla, Yanyan Mochamad Yani, and Widya Setiabudi. "Peran Media Sosial Sebagai Alat Propaganda Dalam Konflik Nagorno Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan." *Global Political Studies Journal* 5.2 (2021): 160-175.
- Sobel, Meghan, Daniel Riffe, And Joe Bob Hester. "Twitter Diplomacy? A Content Analysis Of Eight US Embassies' Twitter Feeds." *The Journal Of Social Media In Society* 5.2 (2016): 75-107.
- Wehrenfennig, Daniel. "Multi-track diplomacy and human security." *Human Security Journal* 7 (2008): 80-88.
- Wichowski, Alexis. "'Secrecy is for Losers': Why diplomats should embrace openness to protect national security." *Digital Diplomacy*. Routledge, 2015. 52-70.